

Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas, Muhammad Khadafi: Upaya Cegah Dari Potensi Jeratan Pidana Pemilu

JIS Sumbar - KOTASOLOK.OPINIPUBLIK.ID

Feb 19, 2023 - 20:10



SOLOK KOTA - Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (Koordiv Parmas dan Humas) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Khadafi, S.Kom, menghadiri sekaligus didaulat sebagai narasumber dalam kegiatan fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas Kota Solok, Minggu, 19 Februari 2023. Kegiatan yang digelar di Ruang Pertemuan Senyaman Resto and Cafe, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok iyu dibuka oleh Koordinator

Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Rafiqul Amien, S.Pd.I, M.Pd. Turut hadir Ketua Bawaslu Kota Solok Triati, S.Pd. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Dr. Budi Santosa, MP, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Solok Agustin Melta, S.Sos.

Muhammad Khadafi mengawali paparannya, menyampaikan bahwa saat ini tengah berlangsung proses tahapan Pemilu, yaitu pemutakhiran data pemilih, melalui pencocokan dan penelitian (Coklit).

Untuk itu dia menghimbau seluruh masyarakat terutama kaum penyandang disabilitas (berkebutuhan khusus) yang hadir, untuk aktif mengawasi dan memastikan hak-hak sebagai pemilih terfasilitasi dengan baik, sehingga tidak ada yang tidak terdata.

"Hal itu mengingatkan pentingnya arti Pemilu dalam menentukan pemimpin, yang kemudian akan membuat aturan dan kebijakan, yang tentunya akan berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, bahkan hingga ke generasi penerus," ungkap Khadafi di hadapan para peserta kegiatan tersebut.

Selain itu, di hadapan 40 orang peserta, yang terdiri dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Solok, Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia (HWPDI), serta staf Bawaslu setempat, Khadafi menjelaskan terkait tindakan-tindakan yang harus dicegah dalam tahapan proses Pemilu, yang berpotensi bisa menjerat pada dugaan pelanggaran dan pidana Pemilu, hingga berakibat hukum.

"Jangan sampai teman-teman terlibat dalam pelanggaran Pemilu, terutama politik uang. Karena akan mengakibatkan bersentuhan langsung dengan permasalahan hukum (potensi jeratan pidana Pemilu)," ujarnya.



Dalam kesempatan itu, kepada awak Media, Muhammad Khadafi menyampaikan bahwa dengan dilaksanakan kegiatan ini diharapkan dapat menambah pemahaman para kaum disabilitas terhadap proses kepemiluan, sehingga

kedepan mereka tidak hanya menjadi objek dari semua tahapan Pemilu, akan tetapi bisa menjadi subjek, terutama dalam konteks pengawasan partisipatif dan pencegahan pelanggaran.

"Kita berharap, teman-teman yang diberikan keistimewaan oleh Allah ini, juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan aspirasi kepada semua pihak, baik pihak yang akan menjadi peserta Pemilu maupun kepada penyelenggara. Terutama dengan turut menjadi bahagian dari pengawasan partisipatif, dengan melakukan pencegahan-pencegahan di lingkungannya masing-masing," ujar Khadafi.

Tak hanya melakukan pencegahan, lebih penting lagi kata Khadafi, dengan pemahaman terhadap aturan-aturan dalam proses Kepemiluan ini, adalah sebagai upaya dalam mencegah mereka dari potensi jeratan pidana Pemilu akibat dari pelanggaran yang dilakukan.

"Melalui kegiatan ini diharapkan mereka terhindar dari proses-proses penindakan akibat pelanggaran Pemilu di setiap tahapannya," tutur Khadafi.

Mantan Ketua Bawaslu Payakumbuh itu juga berharap agar di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, juga terjalin komunikasi yang sama. Tidak hanya secara formal seperti ini saja, namun juga informal. Disebutkannya, Bawaslu itu ada di setiap tingkatan sampai Kelurahan atau Desa, yang diharapkan proaktif untuk mengunjungi.

"Melalui komunikasi dan silaturahmi itulah, diharapkan dapat mencegah dan mengurangi, bahkan meniadakan terjadinya pelanggaran Pemilu pada pelaksanaan Pemilu serentak 2024 nanti," pungkasnya. (Amel)